

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang di atur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional artinya pendidikan bagi kehidupan warga negara indonesia. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>1</sup>

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seperti peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tentunya dibutuhkan tenaga pendidikan yang professional, seperti yang tertera dalam UU RI No.20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 39 ayat (2) tentang

---

<sup>1</sup> Sudriamunawar, Haryono. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Mandar Maju. Bandung. 2002, hlm. 55

Sistem Pendidikan Nasional bahwa: “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.<sup>2</sup>

Untuk mendapatkan pendidikan yang layak di zaman sekarang khususnya tidak harus memperoleh pendidikan di negeri karena jumlah sekolah negeri terbatas maka di bangunlah sekolah swasta. Ketika pemerintah terbatas pendanaannya dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah swasta berperan untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Anehnya, saat merasa memiliki dana pendidikan yang semakin besar, pemerintah dengan gencar mempromosikan sekolah gratis, keberadaan sekolah-sekolah swasta justru dipinggirkan.

Sejarah perkembangan sekolah swasta juga selalu tumbuh dari masyarakat. Bahkan, tidak sedikit sekolah swasta yang kini menjelma menjadi besar dan mapan berasal dari wakaf seseorang yang kemudian dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh pengurusnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi sekolah swasta sesungguhnya lebih banyak ditentukan oleh militansi perjuangan guru, kepala sekolah, serta para pengurusnya. Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi bagian dari bidang yang dapat dikelola secara profit. Fenomena itu dapat diamati melalui beberapa sekolah

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 55

swasta yang tumbuh dan berkembang dengan dimodali sekelompok orang kaya yang bergabung dalam suatu yayasan pendidikan.

Sekolah swasta, juga disebut sebagai sekolah independen tidak dikelola oleh pemerintah daerah serta nasional. Sekolah swasta memperoleh hak untuk menyeleksi siswa dan didanai seluruhnya atau sebagian dengan membebankan biaya sekolah kepada siswa, daripada bergantung pada dana pemerintah, siswa dapat memperoleh beasiswa masuk sekolah swasta yang menjadikan biaya sekolah lebih mudah tergantung bakat siswa, misalnya beasiswa olahraga, beasiswa seni, beasiswa akademik.

Pada pendirian sekolah swasta segala kebutuhan operasional pendidikan sekolah itu ditanggung yayasan dan sebagai timbal balik yayasan mewajibkan siswa membayar donasi pendidikan yang telah ditentukan. Persoalan donasi pendidikan bagi *stakeholder* sekolah swasta berkategori besar dan mapan tentu tidak lagi menjadi masalah. Sebagian besar *stakeholder* sekolah meyakini bahwa lembaga pendidikan yang berkualitas memang seharusnya dijual dengan harga mahal. Dalam hal ini, masih sangat sedikit sekolah swasta yang berkategori besar dan mapan. Kebanyakan sekolah swasta yang ada saat ini berkategori menengah ke bawah. Mayoritas sekolah swasta berkategori kecil dengan fasilitas seadanya yang biasanya donasi pendidikan sekolah tersebut bersumber dari masyarakat dan pemerintah.<sup>3</sup>

Bagi sekolah swasta, jumlah siswa akan sangat menentukan besaran dana operasional yang dapat dihimpun. Jika jumlah siswa berlebih, dipastikan

---

<sup>3</sup> Prasetijo Rijadi, *Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan*, Surabaya: Airlangga University Press. 2005, hlm, 75

pemasukan dana akan cukup untuk membiayai operasional pendidikan. Bahkan, sebagian dana bisa dimanfaatkan untuk berinvestasi guna mengembangkan sekolah jika jumlah siswa berkurang, pengurus harus berusaha mencari kekurangan dana.<sup>4</sup>

Ada dua faktor penyebab dari nasib buruk yang menimpa lembaga-lembaga pendidikan kita, yang pertama adalah faktor external, yang salah satunya adalah begitu agresifnya sekolah-sekolah negeri dalam menambah bangku siswa baru. Penambahan bangku ini bisa melalui pembukaan sekolah baru, penambahan kelas baru, atau dengan jalan membuka shift baru. Bahkan, tak jarang cara-cara kurang terpuji dilakukan. Misalnya dengan menugaskan siswa-siswa kelas dua melakukan prakerin (praktek kerja industri) selama setahun. Faktor kedua adalah berasal dari internal sekolah-sekolah swasta sendiri. Kebanyakan, para pengelola sekolah swasta tidak memiliki kepercayaan diri yang memadai untuk bersaing dengan sekolah-sekolah negeri.

Akibat dari ketidakpercayaan diri pada sekolah swasta cukup fatal, dimana strategi penerimaan siswa baru sekolah swasta hanya menunggu limpahan siswa-siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Faktor internal lainnya adalah tidak dimilikinya strategi pemasaran yang handal. Tenaga pengajar guru sangatlah penting sekali karena untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tentunya dibutuhkan tenaga pendidikan yang profesional, seperti mencari guru-guru yang sudah mempunyai profesional tinggi guna untuk melancarkan proses pembelajaran di sekolah. Guru yang mempunyai profesional dan pengalaman

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 76

tentu juga dapat mengangkat pamor sekolah swasta agar masyarakat lebih meminati bersekolah di swasta yang ditunjang dengan guru-guru yang profesional dan berkualitas.

Selain tenaga pengajar, sekolah swasta harus memperhatikan seperti fasilitas sekolah. Mengingat sekolah swasta di Kota Bandar Lampung kurang memiliki fasilitas yang baik. Banyak juga sekolah swasta yang kurang layak untuk di jadikan sebagai sarana untuk menuntut ilmu yang tidak di perhatikan oleh dinas pendidikan, lalu faktor pihak yayasan yang dikarenakan minimnya dana untuk sekolah swasta tersebut. Berknaan dengan pemberian izin mendirikan bangunan di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Keputusan Dirjen.Dikdasmen Depdikbud No.018/Kep/1983.

Berdasarkan dengan isi ketentuan tersebut di atas, dapat diartikan bahwa pemberian izin mendirikan bangunan gedung harus memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian, bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Sekolah adalah sebagai tempat anak penerus bangsa untuk melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri anak bangsa. Dalam hal ini pemerintah Kota Bandar Lampung berperan untuk pelaksanaan pemberian izin kepada yayasan swasta yang ingin mendirikan sekolah swasta demi kelangsungan pendidikan anak

bangsa karena terbatasnya sekolah negeri yang ada di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis tentang **“PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin mendirikan sekolah swasta di Kota Bandar Lampung?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan sekolah swasta di Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi bagaimana sikap professionalism Dinas Pendidikan dalam pemberian izin kepada pihak swasta dalam melaksanakan sekolah swasta untuk pelaksanaan pendidikan

### **1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kota Bandar Lampung

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin mendirikan sekolah swasta di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan sekolah swasta di Kota Bandar Lampung